

Etnisitas dan Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017

Etnisity and Behavior Choose Community's Figure in Bupati and Vocational School of Regency 2017 Muaro Jambi District

Burlian Senjaya^a

^a Staf Pengajar Program Ilmu Pemerintahan STISIP Nurdin Hamzah Jambi, email: senjayaburlian@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan tentang pengaruh etnisitas dalam perilaku memilih tokoh masyarakat pada kontestasi politik lokal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017. Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di beberapa daerah, tampaknya mesin politik partai bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan akan dijatuhkan. Artikel ini menyuguhkan sebuah kesimpulan bahwa Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh tokoh masyarakat (elit lokal) sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik dan pilihan politik di tingkat lokal. Artikel ini mengindikasikan bahwa perilaku memilih tokoh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, masih tergolong sektarian sehingga hal tersebut dapat menjadi menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal.

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan ditingkat lokal, yakni pemilihan

kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elite daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini. Permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit dihindarkan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada aras lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal yang kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Dalam masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (*Soeharto*), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya *etnosentrisme* dan ego kedaerahan yang berlebihan.

Namun, pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. Keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya, kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (*family*) dan kesukuan.

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di kabupaten Muaro Jambi menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberi kembali ruang-ruang etnisitas untuk tumbuh subur di masyarakat.

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir didaerah lain, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini

menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal.

Disisi lain, bagi tokoh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberikan celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi, tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual.

Perilaku memilih tokoh masyarakat dan keterlibatannya pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, memberikan kesan bahwa pilihan rasional masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung dikesampingkan. Mereka yang pada saat mencoblos, meski memilih secara sadar pilihannya, akan tetapi masih didasarkan pada pertimbangan yang bersifat subjektif emosional, memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan dan sebagainya.

Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupun kekerabatan yang masih amat kental pada perilaku memilih tokoh masyarakat, sehingga keberadaan tokoh masyarakat dengan model perilaku memilih tersebut, dapat menghambat proses demokratisasi. Sehingga, jika hal tersebut diarahkan untuk kepentingan politik kekuasaan tertentu, maka hal tersebut menjadi kekuatan politik yang besar.

Kuatnya Ikatan kekerabatan (darah dan kekeluargaan) dan kesamaan kesukuan, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang membentuk perilaku memilih

masyarakat.¹ Etnisitas menjadi hal sangat mendasar dalam tingkah laku memilih tokoh masyarakat pada Pilkada Bupati dan Wakil Muaro Jambi tahun 2017 yang berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi .

B. Tinjauan Etnisitas

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan istilah etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

Menurut Frederich Barth (1988) istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang : (1) Dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak.(2) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. (3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. (4) Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat (5) dibedakan dari kelompok populasi lain.²

Etnik sebagai kategori untuk membedakan 'perilaku' orang-orang merupakan sesuatu yang telah usang. 'Model untuk' yang digunakan dengan mengelompokkan perilaku dan budaya tertentu diasosiasikan dengan etnik tertentu sudah tidak dapat lagi dipergunakan. Sekarang ini, etnik

1 Surbakti Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), hlm. 44

2 Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm 30.

sebagai identitas tidak berarti harus menunjukkan adanya perbedaan budaya. Mengaku berbeda etnik bukan lantas harus menunjukkan perbedaan dalam perilaku. Namun meski demikian, masyarakat umumnya tetap menganut adanya model-model perilaku dan sifat tertentu yang khas etnik tertentu, dan model tersebut digunakan untuk menjelaskan keberadaan etnik bersangkutan.

Konsep etnosentrisme seringkali dipakai secara bersama-sama dengan rasisme. Konsep ini mewakili sebuah pengertian bahwa setiap kelompok etnik atau ras mempunyai semangat bahwa kelompoknyalah yang lebih superior dari kelompok lain. Definisi etnik diatas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Sebuah kelompok etnik pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok etnik tertentu ataukah tidak tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnik tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnik itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut.

Etnik tetap ada karena berkait dengan kebutuhan akan identitas-identitas. Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan yang besar dengan etnik lain, hal itu tidak menghalangi untuk tetap merasa berbeda. Identitas etnik yang diperkuat, dimana identitas etnik semakin kerap ditonjolkan dalam kehidupan sosial seperti yang terjadi belakangan ini, kontradiktif dengan ramalan para pemuja globalisasi. Justru, perkuatan identitas etnik lahir sebagai perlawanan atas globalisasi. Etnik dijadikan alat politik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi

dalam meraih sumber daya tertentu.

Etnisitas sebagai ikatan primordialisme terkadang digunakan oleh elit politik lokal di suatu daerah sebagai isu dalam meraup suara pada saat momentum disebuah pemilihan. Para elit lokal terkadang mendoktrinasi anggota kelompoknya serta menyebarkan kepercayaan serta kebencian yang menjadi sumber ketegangan sosial. Segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan social yang terikat kedalam oleh ikatan-ikatan primordial dengan sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain mudah sekali menimbulkan konflik-konflik diantara kesatuan-kesatuan sosial tersebut.

Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam tingkatan konflik yang mungkin terjadi, yakni (1) konflik dalam tingkatan yang bersifat ideologis, (2) konflik didalam tingkatan yang bersifat politis. Pada tingkatan yang bersifat *ideologis*, konflik tersebut terwujud didalam bentuk konflik antara system nilai yang dianut serta menjadi ideology dari berbagai kesatuan sosial. Pada tingkatan yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan didalam pembagian status kekuasaan & sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya didalam masyarakat.³

Berbicara mengenai etnisitas tetap tidak kehilangan momentum. Hanya saja, pemahaman mengenai etnisitas perlu ditambahkan. Tidak saja etnik sebagai kategori orang-orang karena budaya dan darah, tetapi lebih penting lagi telah menjadi kategori identitas politis, dimana identitas etnis tetap dipertahankan karena memang bermanfaat. Meminjam istilah Edward Said, guru orientalisme, identitas etnikpun bisa dipilah sebagai identitas murni dan identitas politis. Identitas etnik menjadi identitas politis manakala identitas

3 Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006) hlm 34.

Burlian Senjaya

itu dipergunakan demi tujuan tertentu untuk memperoleh kemanfaatan tertentu.

C. Tinjauan Tentang Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.⁴

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara

⁴ Surbakti Ramelan, *Memahami Ilmu Politik*, hlm 15.

dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.⁵

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

Pemilu, sebagai medium pilihan publik, seyogyanya mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu lokus (Pusat).⁶

Dalam hal ini, proses pemilihan kepala daerah/Pilkada. Seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang *legitimate* sebagai harapan dari *ending* transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada secara

5 Surbakti Ramelan, *Memahami Ilmu Politik*, hlm 145.

6 Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang :Averroes Press Malang, 2005) Hlm 39.

langsung. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan atmosfer politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik.

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa mengandung kultur *vested interest* (kepentingan pribadi) di kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.⁷

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga Negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan.⁸

Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik, untuk membedakannya dari perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang

7 Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008) hlm 44-45.

8 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1972) Hlm 30.

tinggal dalam suatu wilayah.⁹

Secara lebih rinci Popkin membedakan antara pilihan politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan perilaku tersebut. *Pertama*, memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa depan. *Kedua*, pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. *Ketiga*, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya. *Keempat*, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa depan. Dari beberapa karakteristik tentang perilaku memilih tersebut, yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses pemilihan umum (Pemili).

Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan Kepala Daerah, dimana pemilih banyak menggunakan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan putusan mereka dengan pemberian suara melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung. Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Jung membedakan dua tipe karakter utama pemilih yang *ekstrovert* dan *introvert*. Introvert berbalik dalam diri manusia

9 Surbakti Ramelan, *Memahami Ilmu Politik*, hlm 145.

itu sendiri, kepada dunia ide tidak peduli dengan pendapat orang lain seorang ekstrovert berminat dengan sesuatu yang berada disekirarnya, dalam kekayaan, prestise, persetujuan sosial, dan konformitas.¹⁰

Pendekatan perilaku pemilih dalam kehidupan suatu masyarakat selalu terdapat pola-pola dan cara-cara tertentu yang dianut oleh warga masyarakat. Pola dan cara-cara tersebut merupakan tingkah laku masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang yang sukarela atau dengan terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang diharapkannya, maka keputusan yang diambilnya itu amat dipengaruhi oleh pola dan cara fikir yang dianutnya.

Hal tersebut diatas tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikis dan pola pikir tokoh masyarakat, terlebih lagi oleh kuatnya dorongan dalam rangka memperebutkan ataupun mempertahankan sumber-sumber yang dianggap perlu.

Pola dan cara berfikir menurut tokoh masyarakat itu sendiri lahir, tumbuh dan berkembang sebagai pedoman dalam kebudayaan yang ada dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan anggota masyarakat lainnya tidak dapat disangkal bahwa manusia mempunyai bentuk-bentuk karakteristik yang terwujud dalam kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan. Dengan demikian, dalam melihat perilaku politik seseorang perlu menggunakan beberapa pendekatan. Dalam menganalisis perilaku pemilih dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokan-

10 Ambo Upe, *Sosiologi Politik*, hlm 111.

pengelompokan social mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, afiliasi religious.

Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Pendekatan psikologis, pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek

diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut; *kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan; *ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

Kedua pendekatan tersebut diatas melihat bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan perilaku politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan rasional.

Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternative yang paling menguntungkan (maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternative yang menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat.

Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, informasi dan pribadi yang populer

atas prestasi yang dimilikinya.

Beberapa pendekatan yang telah dibahas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang *otonom*, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Tokoh Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.

Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religious (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat pemerintah, polisi, dan militer). Para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan.

Proses pendekatan diatas tentunya akan berdampak pula pada perkembangan perilaku memilih tokoh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi yang masih sangat dipengaruhi oleh semangat etnisitas dan kedaerahan yang tinggi, serta para tokoh masyarakat lokal yang menjadi patron di daerah tersebut.

D. Tinjauan Tentang Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut Surbakti (thn:1992) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena

aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya

Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. *Pertama*, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. *Kedua*, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.

Pada pihak lain tidak hanya di Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai “wakil” atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri.¹¹

Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

11 Surbakti Ramelan, *Memahami Ilmu Politik*, hlm 45.

Burlian Senjaya

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakatnegara.

Kata *society* berasal dari bahasa latin *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Dapat kita telaah korelasi hubungan antara ketokohan didalam masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan secara sosiologis ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut:

Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Setiap bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Etnisitas dan Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat...

Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan (*equilibrium*) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.¹²

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya.¹³

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya system lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau

12 Philipus dan Aini, Nurul, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006) hlm 30.

13 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 56.

Burlian Senjaya

mungkin juga keturunan yang terhormat.¹⁴

Hal inilah yang menjadi salah Satu faktor timbulnya pelapisan dalam masyarakat/*stratifikasi social*, Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi factor yang signifikan didalam proses memilih pemimpinnya.

Dalam konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, peran tokoh masyarakat tentunya juga sedikit banyak mempengaruhi tingkah laku memilih masyarakat, dikarenakan bahwa tokoh masyarakat tersebut adalah orang-orang yang memiliki loyalitas dan kemampuan dalam memimpin masyarakat.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.¹⁵

Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dengan suatu kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kejadian diwarnai dari segi kepemimpinan seorang tokoh masyarakat.

14 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm 199.

15 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972) hlm 10.

Etnisitas dan Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat...

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya *paternalistik*, di mana peran seorang tokoh/ elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para *stakeholders* dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Elit pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit Ormas merupakan tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa, elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaiannya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka bisa berprofesi guru, pegawai/pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka menyandang lebih dari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan elit agama, begitu pula untuk tokoh/ elit yang lain. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan praktisnya.

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena

Burlian Senjaya

berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat.

E. Eksistensi Tokoh Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi.

Proses pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017, membawa peran serta tokoh masyarakat lokal dalam pergulatan politik yang sedang menuju babak baru yakni politik identitas. Hal ini kemudian menjadi topik penelitian penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu-ilmu sosial terutama dibidang sosiologi politik.

Peranan tokoh masyarakat tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai partai politik besar guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap pemilihan umum yang digelar disetiap daerah, tetapi tidak sedikit pula tokoh masyarakat yang berpengaruh juga menolak untuk bergabung dengan partai politik.

Pada saat pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Muaro Jambi dilangsungkan bahwa terlihat masih kuatnya hubungan ikatan primordialisme yang sangat kental dalam melakukan suatu resume politik. Seorang tokoh masyarakat dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat. Ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang dianggap sebagai perwujudan dari masyarakat itu

sendiri. Begitupun juga menurut *Ramlan Surbakti* bahwa kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.

Fakta *objektif* tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga dari hasil penelitian selama di Kabupaten Muaro Jambi dalam studi pengaruh etnisitas dalam perilaku memilih tokoh masyarakat Kabupaten Muara Jambi pada pilkada 2017 mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di kabupaten Muaro Jambi.

Tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen didalam masyarakat itu kemudian mewujudkan dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan masyarakat serta senantiasa menjadi yang terdepan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam masyarakatnya.

Tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda yang dikenal oleh khalayak memiliki kredibilitas, diharapkan berani tampil dan membawa aspirasi dan harapan masyarakat dalam berkompetisi di pilkada yang berlangsung tersebut, hal ini memungkinkan pemberhentian kepenatan setelah melihat figur-figur yang ada dan belum dirasa/diyakini maksimal dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warganya, sebagaimana impian demokrasi yang menekankan adanya perwujudan kesejahteraan yang sejati.

Disamping itu, tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda hendaknya bersama-sama para penyelenggara

pilkada dan seluruh elemen yang erat kaitannya terhadap momentum pilkada seperti panwaslu, parpol, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat dan lain sebagainya, Tidak hanya memposisikan masyarakat menjadi penonton semata dalam momentum pilkada. Tetapi proaktif memberikan pentingnya *Voter education* dan *Politik* bagi masyarakat yang menekankan pada ranah kesadaran kritis, kesadaran berpolitik rakyat, dan yang lebih mendasar yakni pentingnya partisipasi masyarakat.

Begitu pentingnya sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, memungkinkan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil agar tercipta pula tatanan tokoh masyarakat yang lebih baik. Partisipasi tokoh masyarakat dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Karena itu, proses demokratisasi yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu.

Format demokrasi pada arus lokal (pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Apabila demokrasi yang totalitas bermetamorfosis menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut.

Tokoh Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi merupakan kolektifitas dari individu-individu yang tinggal dan menetap pada

wilayah yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga kumpulan individu-individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Maka dari itu sesuai yang dikemukakan oleh *Drs.Ng. Philipus,M.si.* dan *Dr. Nurul Aini, M.S.* bahwa ilmu sosial mencoba memahami, menelaah, meneliti, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Ia juga mencoba memahami pikiran, ide, gagasan; lembaga-lembaga yang mewujudkan ide, gagasan dan pikiran itu; struktur sosial yang muncul akibat dari perbedaan pemilikan atas barang-barang yang dianggap bernilai; persaingan dan konflik yang timbul akibat dari usaha memperebutkan nilai-nilai yang dianggap bernilai; perubahan-perubahan sosial, baik dalam artian pikiran, gagasan, struktur sosial maupun dalam artian lembaga sosial secara keseluruhan.

Eksistensi tokoh masyarakat sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri sebagaimana halnya penelitian yang telah lakukan di kabupaten Muaro Jambi bahwa identifikasi partai politik dengan latar belakang ideologis bahkan politis, tidak menjamin adanya suatu kekuatan yang menggerakkan masyarakat apalagi mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Terkadang eksistensi tokoh masyarakatlah yang menentukan kemana pilihan masyarakat diatuhkan.

Hubungan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yakni hubungan antara tokoh masyarakat yang

memiliki sumber kekuasaan dan kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini juga sangat relevan dari apa yang dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* yang memberikan diferensiasi antara kekuasaan dengan kewenangan (*authority* atau *legalized power*) ialah bahwa kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan.

Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada figur idolanya, biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut, tidak serta merta termanifestasi kedalam suatu bentuk wewenang yang *legitimate* secara konstitusional. Melainkan hanya berkisar pada sesuatu pengaruh yang bersifat otokratis-tradisional, bukan secara eksplisit termaktub dalam aturan-aturan konstitusional. Legitimasi terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari suatu pemahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik mampu mendongkrak suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat *sakralistik* yang mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal.

Perilaku memilih tokoh masyarakat cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan *subjektif-psikologis* yang syarat dengan *primordialisme radikal*. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik oleh *Gabriel A. Almond* dan mengatakan bahwa, berbagai mithos, doktrin dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi.

Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman atau pewarisan nilai-nilai itu adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, organisasi dan pemimpin masyarakat, disamping juga lambang-lambang fisik seperti bendera dan upacara-upacara yang dipenuhi dengan makna politik.

Proses menanamkan rasa-terikat (*attachment*) pada diri anggota masyarakat ini kemudian menjadi berakar sangat kuat, sehingga kadar legitimasi pada sistem politik tersebut menjadi sangat tinggi pula. Secara empiris terbukti bahwa dalam sistem politik yang dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam.¹⁶

Kecenderungan budaya sukuisme (*ethnic group*) yang terasa pada pilkada di kabupaten Muaro Jambi mengindikasikan bahwa demokratisasi di tingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif di daerah, itu kemudian jauh dari apa yang menjadi cita-cita demokrasi itu sendiri.

Hal ini membawa kita kepada perspektif sempit dari makna politik yang lebih luas. Hadirnya pilkada sebagai tuntutan di ranah lokal yang merupakan manifesto kebijakan desentralisasi yang diselenggarakan oleh mulai hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Itu terlihat dari beberapa tokoh masyarakat yang berperan serta dalam politik praktis pada pilkada 2017 di kabupaten Muaro Jambi.

Kecenderungan perilaku sukuisme yang melatarbelakangi perilaku memilih tokoh masyarakat ini termanifestasi dalam bentuknya yang konkrit, yakni pola berpikir serta tindakan masyarakat yang cenderung melihat cara pandang figur idolanya adalah cara pandang yang

16 Mohtar Mas'ood, dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta:Gadjah Mada University, 1990) hlm 34.

Burlian Senjaya

harus diikuti seluruh masyarakat secara kolektif.

Adanya suatu Kecenderungan perilaku yang bersifat umum (*general will*), dan terkontruksi secara sistematis dan mengakar dan merupakan hal yang wajar, karena menurut *Gene Sharp* dan *David Easton* bahwa alasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu tradisi yang mengikat, kesetiaan pada kelompok, dan kesadaran hukum.

Maka eksistensi tokoh masyarakat yang representatif mewakili keberadaan masyarakat itu sendiri, merupakan hal yang mendorong munculnya semangat kesukuan yang etnosentristik, hal inilah yang juga dapat menghambat terwujud masyarakat yang multikultural sebagai keniscayaan yang terdapat di daerah yang sedang mengalami perkembangan seperti Kabupaten Muaro Jambi.

F. Etnisitas dan Perilaku Memilih Tokoh Masyarakat.

Perilaku memilih tokoh masyarakat masih sangat dipengaruhi sistem kekeluargaan dalam ikatan kesukuan yang terjalin di Kabupaten Muaro Jambi pada saat Pilkada tahun 2017. Persoalan ini menjadi hal penting, ketika meneliti dan mengamati pengaruh etnisitas dalam perilaku memilih tokoh masyarakat pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual, mereka sangat antusias dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang penulis sampaikan. Namun masih banyak juga diantara narasumber yang tertutup dalam menyampaikan informasi kepada penulis.

Narasumber tokoh agama yang penulis utarakan

pertanyaan mengenai keterlibatannya pada pilkada 2017 di kabupaten Muaro Jambi. Jawaban yang beliau sampaikan, bahwa tidak terlibat secara langsung sebagai tim sukses salah satu calon yang maju, namun mendukung putra daerah yang maju sebagai kandindat Bupati Muro Jambi, bagi tokoh agama putra daerah yang lebih pantas memimpin Kabupaten Muaro Jambi. Penjelasan yang disampaikan oleh tokoh agama tersebut pada prinsipnya cukup rasional namun masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan. Menurut Pareto, mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang terbaik dan merekalah yang dikenal sebagai elit.

Informan lain yang juga disampaikan oleh tokoh agama berpendapat bahwa pada prinsipnya pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta akhlak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. Dalam Konteks ini penulis berkesimpulan bahwa tokoh agama cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu calon, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh Agama tersebut syarat dengan dukungan yang terselubung.

Berbeda dengan beberapa tokoh masyarakat yang lain, dengan tegas memperlihatkan secara langsung dukungannya bahkan mereka aktif sebagai tim pemenangan salah satu kandidat Bupati, tokoh tersebut merupakan tokoh Pemuda, disampaikan kepada penulis bahwa beberapa tokoh pemuda memilih terlibat langsung sebagai tim sukses salah satu calon, kriteria calon bupati yang mereka sampaikan bahwa bupati yang mereka usung harus memiliki semangat atas perjuangan, dekat secara emosional dengan masyarakat, selalu mendukung aktifitas kepemudaan, serta memiliki semangat untuk memajukan

daerah yang berbasis kearifan lokal. Dalam kesempatan ini kalah maupun menang tidak menjadi prioritas utama, prioritas utama yang ingin ditonjolkan yaitu eksistensi dan pengaruh tokoh pemuda dalam memobilisasi masa untuk memilih calon yang mereka usung.

Informasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh pemuda Kabupaten Muaro Jambi, semakin memperkuat asumsi bahwa tokoh masyarakat cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada wacana kesukuan yang *ter-cover* dalam kearifan lokal. Sebagai otoritas berpengaruh, tokoh masyarakat sebagai *patron* yang mempunyai sumber kekuasaan dalam mengarahkan opini publik, tetapi hal ini berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa bangkitnya kebudayaan modern di kota-kota -Kebudayaan sejak lahirnya- merebut tempat kebudayaan tradisional sebagai budaya yang sah bagi generasi mendatang. Beliau menambahkan bahwa terjadi *erosi* pada kebudayaan tradisional, menuju kebudayaan nasional.¹⁷ Memang benar apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo, bahwa telah terjadi pergeseran budaya tradisional menuju budaya nasional.

Dengan diselenggarakannya pilkada diberbagai daerah, tentu akan memicu lahirnya *politik identitas* melalui *retradisionalisasi budaya* yang dicover sedemikian rupa agar terkesan berwajah nasional. Munculnya kebijakan desentralisasi, memicu pula lahirnya budaya politik identitas. Di kabupaten Muaro Jambi sendiri, isu-isu etnisitas menjadi isu yang mencuat kepermukaan pada saat pilkada 2017 berlangsung. Ini terlihat oleh hadirnya beberapa tokoh masyarakat lokal sebagai *patron* yang mengangkat etnisitas sebagai sebuah kekuatan politik dalam merebut kekuasaan.

17 Kuntowijoyo, *Budaya Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) hlm 54.

Pendapat serupapun diungkapkan oleh salah satu tokoh adat, bahwa keterlibatan secara langsung untuk mendukung salah satu calon kandidat bupati sebagai upaya memperkuat pengaruh adat dalam kontestasi tersebut, karena menurut beliau seorang pemimpin harus mengetahui budaya dan adat istiadat daerahnya, maka putra daerah lah yang mempunyai pemahaman dalam adat istiadat tersebut.

Berikut data yang menunjukkan hasil perolehan suara pemilahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

No	Nama Kandidat	Hasil Perolehan Suara
1.	Abun Yani, SH dan Suhariyanto, SH	8.558 Suara
2.	Agustian Mahir, SH dan Suswiyanto	43.632 Suara
3.	Hj, Masnah, SE dan Bambang Bayu Suseno, SP, MM	76.825 Suara
4.	H. Ivan Wirata, ST, MM, MT dan H. Dodi Sularso, SH	62.627 Suara

Sumber : SK KPU Muaro Jambi, No: 5/Kpts/KPU-Kab.005. 435331/2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, mayoritas masyarakat memilih pasangan Hj, Masnah, SE dan Bambang Bayu Suseno, SP, MM, Alasan tokoh masyarakat memilih pasangan tersebut disamping merupakan putra daerah serta adanya ikatan primordial/ kesukuan yang erat antara masyarakat dengan Hj, Masnah,

SE dan Bambang Bayu Suseno, SP, MM jika dibandingkan dengan calon yang lain. Disamping itu juga jika melihat dari rekam jejak karir politik Hj, Masnah, SE Di Kabupaten Muaro Jambi, nama Masnah Busro tidak asing di telinga masyarakat. Sebab Masnah pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2009, kemudian 2011 maju sebagai calon Bupati Muarojambi periode 2011-2015, namun Masnah bersama pasangannya saat itu tidak terpilih. Puncaknya pada 2014 Masnah kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Provinsi Jambi.

Masnah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Muaro Jambi-Batanghari periode 2014-2019. Dua tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, Masnah kembali mencalonkan diri menjadi calon Bupati Muarojambi berpasangan dengan Bambang Bayu Suseno, yang hanya diusung oleh Partai PAN dan PKB.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai narasumber maka menemukan sebuah fakta bahwa ikatan-ikatan primordialisme seperti ikatan darah, kesukuan, kekeluargaan (famili) menjadi faktor yang berpengaruh dalam perilaku memilih masyarakat. Kuatnya ikatan etnisitas dan kekerabatan menjadi hal yang fundamental pada pilkada 2017 di kabupaten Muaro Jambi.

Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik lokal di Indonesia seiring dengan penerapan sistem desentralisasi pasca tumbanganya orde baru Tahun 1998. Dalam perkembangan di Indonesia etnisitas telah mengalami proses pemanipulasian oleh elite dan dijadikan instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di tingkat lokal terutama pada masyarakat dimana sistem primordial etnis masih kuat

berpengaruh, identitas etnis masih menjadi daya tawar yang menarik.

Mengedepankan politik etnisitas sebagai alat negosiasi politik, bagi elite ternyata masih dianggap sebagai sarana efektif untuk merealisasikan tujuan politiknya tetapi di sisi lain upaya itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif berupa lahir dan tumbuhnya benih-benih konflik horizontal antar etnis yang justru menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan.

Konflik tersebut senantiasa hadir sebagai sosial yang tidak bisa dilepaskan, ini tergambar dengan jelas oleh apa yang dikemukakan oleh Agus Salim, bahwa setiap kelompok etnis atau komunitas menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat hidupnya, yang secara tradisional diterima dan diakui kelompok etnis sebagai hak ulayat. Konsep hak ulayat ini secara politik menjadikan hubungan antar etnis berkembang menjadi pembedaan yang tajam dan diskriminasi antara warga etnis asli setempat dan etnis pendatang. Dalam hal ini terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber-sumber alam yang dikuasai. Berbagai bentuk diskriminasi muncul diantara mereka “yang asli” dengan “pendatang”, dalam hal ini pihak asli harus unggul dan pendatang harus lebih rendah.¹⁸

Kesimpulan

Tokoh masyarakat sebagai pelaku pengarah opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat terhindarkan. Dalam konteks pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tokoh masyarakat bukan hanya

18 Agus Salim, *Stratifikasi Etnik* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2006) hlm 54

sekedar pengarah dan pengendali konflik, tetapi tokoh masyarakat diharapkan membawa semangat kedaerahan yang teraktual dalam sifat etnosentrisme.

Etnosentrisme sebagai bangunan *ideology local* yaitu sikap mengrdepankan nilai-nilai kesukuan, kekerabatan, kkeluargaan (family, dan tradisi kedaerahan yang menjadi sebuah kekuatan politik kedaerahan. Perilaku memilih tokoh masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan/kedaerahan dalam hal ini kesukuan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi Pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2017.

Pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Muaro Jambi besarnya kecenderungan etnis dalam perilaku memilih tokoh masyarakat membuat pilihan-pilihan rasional menjadi hal yang urgen, hal demikian karena kuatnya pengaruh kesukuan yang membentuk pribadi dan tindakan masyarakat.

Tatanan nilai tradisi yang merupakan identitas kultur masyarakat yang tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan mereka karena, merupakan wajah kebudayaan masyarakat yang sudah mengakar sejak dulu sampai sekarang.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik ditingkat lokal. Menguatnya isu etnisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah.

Bibliography

- Barth, Fredrik, *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta, UI Press, 1988
- Baharuddin, Sukman, *Pilkada dan kecerdasan politik* Fajar online, 15 September 2017.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta 1972
- Ramelan, Surbakti , *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Grasindo, 1992
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*: Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006
- Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press Malang 2005
- Mas' oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 1990.
- Kuntowijoyo, *Budaya Dan Masyarakat*, Yogyakarta, Tiara Wacana. 2006.
- Salim, Agus, *Stratifikasi Etnik*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2006
- Surbakti, *Memahami ilmu politik*, PT. Grasindo, Jakarta 1992
- Philipus dan Aini, Nurul, *Sosiologi dan Politik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007
- Upe, Ambo, *Sosiologi Politik Kontemporer*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2008